

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM KANTOR KECAMATAN MANDREHE UTARA

Kecamatan Mandrehe Utara merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk pada tanggal 18 Februari 2005 dan terletak di wilayah Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Mandrehe Utara berada di sebelah Barat Pulau Nias yang berjarak 16 km kearah utara dari kota Nias Barat yakni Lahomi dan 58 Km dari Gunungsitoli.

Ibukota Kecamatan Mandrehe Utara adalah Desa Lahagu. Batas-batas Kecamatan Mandrehe Utara adalah sebagai berikut:

- 1 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simanaere, Desa Hilogodu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias dan Desa Hiliuso Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat.
- 2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hayo, Desa Doli-Doli, Desa Lologolu, Desa Tuwuna Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.
- 3 Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Baho Desa Lolozirugi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dan Desa Botona'ai Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara.
- 4 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Te'olo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara dan Desa Hiligodu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias.

Luas wilayah Kecamatan Mandrehe Utara adalah 39,6 km² atau sebesar 8 % dari total luas Kabupaten Nias Barat. Luas wilayah desa di Kecamatan Mandrehe Utara sebagai berikut:

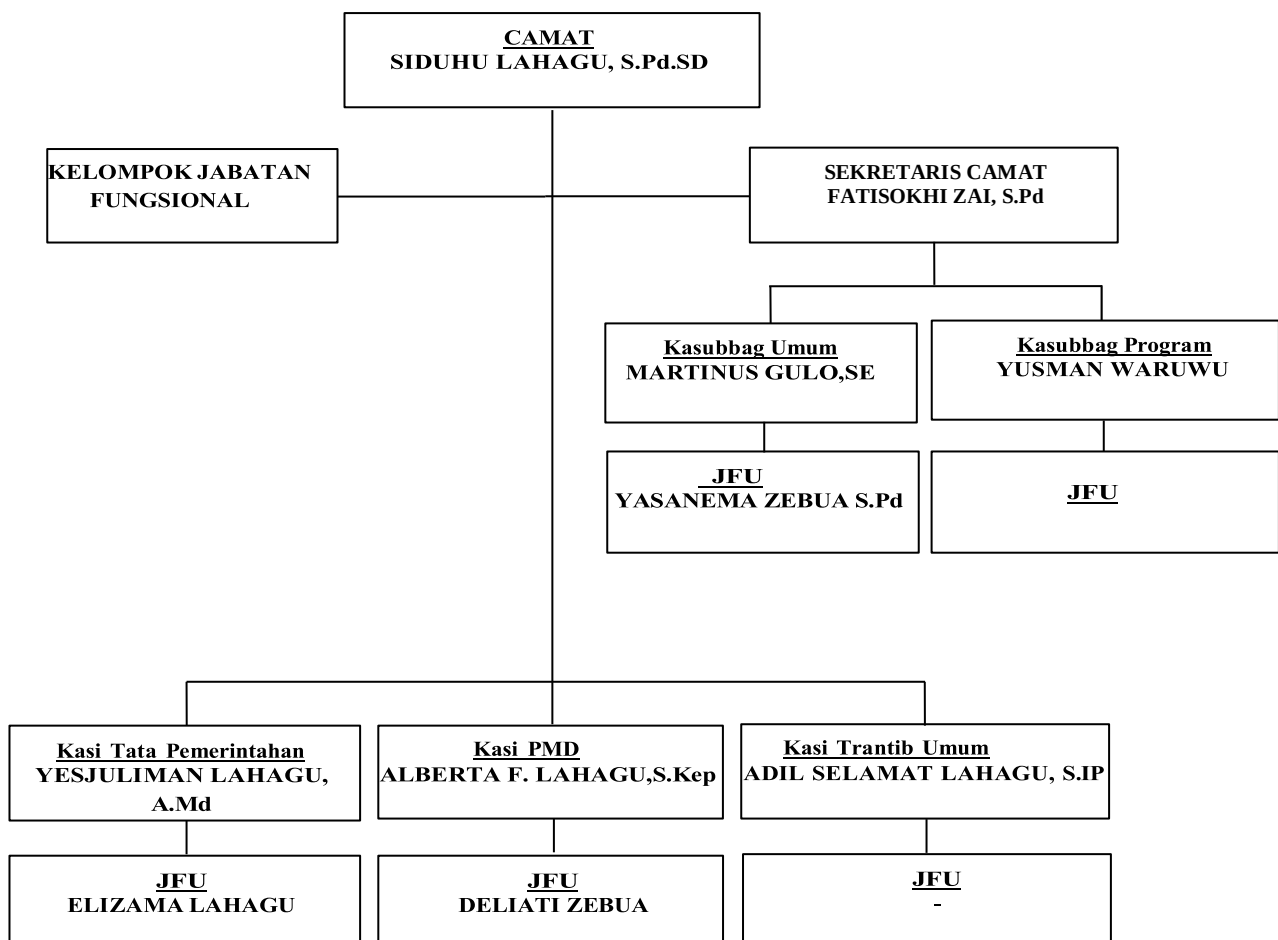
Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Mandrehe Utara

No	Nama Desa	Luas wilayah (km ²)	Persentase terhadap luas wilayah kecamatan
1	Balodano	5,49	13,88
2	Hiambanua	2,77	7,00
3	Hilimayo	1,39	3,15
4	Hilimbaruzo	2,78	7,03
5	Hilimbowo	3,76	9,50
6	Lahagu	3,76	9,50
7	Lolomboli	2,81	7,10
8	Ononamolo I	2,16	5,46
9	Ononamolo II	7,46	18,86
10	Sihare'o	1,92	4,85
11	Taraha	2,42	6,12
12	Tarahoso	2,84	7,18
Jumlah		39,6 km²	

4.1.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mandrehe Utara

Berikut gambar struktur organisasi Kantor Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat berdasarkan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Tingkat Kabupaten, Kantor Kecamatan Mandrehe Utara telah menyelenggarakan berbagai tugas-tugas Pemerintah Tingkat Kecamatan di berbagai bidang pemberdayaan masyarakat baik yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Mandrehe Utara adalah :

1. CAMAT

Tugas pokok :

Pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang di limpahkan Kepada Daerah.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan tugas Pemerintah yang meliputi pembinaan pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan sosial .
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan

4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Rincian tugas :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan sesuai dengan amanat praturan perundang-undang yang berlaku.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepala daerah sesuai dengan amanat praturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyusun program dan kegiatan kecamatan.
4. Menyelenggarakan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan umum.
5. Menyelenggarakan tugas pemerintah yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
6. Menyelenggarakan tugas pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan.
7. Menyelenggarakan tugas pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
8. Mengadakan koordonasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan
9. Mengadakan koordonasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
10. Mengadakan koordonasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

11. Mengadakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
12. Mengadakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
13. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
14. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dibidang ekonomi dan pembangunan.
15. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan di bidan sosial dan keasyarakatan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Nias Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS CAMAT

Tugas pokok :

Penyelenggaraan pengolaan tugas bidang umum kepegawaian, keuangan program evaluasi dan pelaporan di kecamatan.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan, rencana anggaran belanja aparatur dan publik, penyelenggaraan administrasi Keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pelaksanaan tata usaha, pengelola admistrasi surat menyurat, inventaris dan perlengkapan kantor pemberdayaan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

3. Pelaksanaan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
4. Penyiapan bahan administrasi dalam penyelenggaraan koordinasi dilingkup pemerintah kecamatan.

Rincian tugas :

1. Mengawasi pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan perlengkapan dan ketatausahaan.
2. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan keprotokolan dan hubungan masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
5. Melaksanakan pasilitas dan koordinasi pemungutan PBB .
6. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. SUB BAGIAN UMUM

Tugas pokok :

Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan dikecamatan.

Rincian tugas :

1. Melaksanakan penerimaan pendistribusian dan pengiriman surat-surat.

2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan administrasi kepegawaian.
3. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
4. Melaksanakan urusan ruah tangga keematan, menjaga kebersihan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor camat.
5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor kendaraan dinas perlengkapan kantor dan asset lainnya.
6. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan administrasi perlengkapan dan perbekalan serta pembinaan pegawai.
7. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
8. Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
9. Mempersiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengolahan administrasi keuangan.
10. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
11. Melaksanakan penyiapan konsep pelaporan Tahun Anggaran dan laporan pertanggungjawaban kecamatan.
12. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan gaji pegawai.
13. Mengkoodinasi dan memfasilitasi yang berhubungan dengan perizinan.

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUB BAGIAN PROGRAM

Tugas pokok :

Pelaksanaan yang berhubungan dengan penyusunan program, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program di kecamatan.

Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Mengkompilasi dan mendokumentasikan hasil perencanaan unit kerja di lingkungan kecamatan.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta mengumpulkan menyusun laporan pelaksanaan program di kecamatan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Tugas Pokok :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
3. Melaksanakan penilain atas laporan pertanggungjawaban kepala desa.

4. Memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa/ kelurahan di wilayah kerjanya.
5. Memfasilitasi penataan desa / kelurahan.
6. Memfasilitasi penyusunan praturan desa/kelurahan,
7. Mengkoordinasi kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan.
9. Memproses dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembuatan monografi desa.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tugas Pokok :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Menyelenggaraan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan kepemudaan, olah raga, kebudayaan, pendidikan, kesehatan serta pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan peranan waniTA

4. Memproses dan melakukan pembinaan pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perlombaan desa.
6. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembuatan profil desa.
7. Melakukan koorsinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
8. Melaksanakan pembinaan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunandan sosial kemasyarakatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
10. Memproses dan melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa(BPD).
11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penilain desa terbaik.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas Pokok :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian Tugas :

1. Meyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban.
2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.
4. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan.
6. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat
7. Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan LSM, Jurnalistik dan Kepartaian.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Peran Kepemimpinan Camat dalam Implementasi Program

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Camat Mandrehe Utara menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif-kolaboratif dalam mengelola program-program pemerintah. Gaya kepemimpinan ini tampak dari upaya pelibatan aktif berbagai pihak, mulai dari perangkat kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, kelompok pemuda, hingga kelompok perempuan pada setiap tahap pelaksanaan program, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Camat Mandrehe Utara menyatakan “Saya menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif semua merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program.”

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Camat berusaha menciptakan rasa memiliki di kalangan perangkat kecamatan dan masyarakat. Pendekatan ini diperkuat oleh Sekretaris Camat, yang menambahkan bahwa Camat memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif. Menurutnya “Bapak Camat memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif. Beliau selalu mendengarkan masukan staf dan memberikan ruang diskusi sebelum mengambil keputusan.”

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait.

Dalam perannya sebagai koordinator, Camat menjembatani komunikasi antara kecamatan, pemerintah kabupaten, dan masyarakat desa. Peran ini diakui oleh Kasubag Program, yang menyampaikan “Beliau memastikan administrasi dan koordinasi program berjalan baik. Kami diberikan arahan langsung agar laporan tepat waktu dan sesuai aturan.”

Sebagai koordinator, Camat juga mengoordinasikan perangkat desa agar melaksanakan program sesuai ketentuan. Kasi PMD menegaskan “Beliau sangat aktif mengoordinasikan desa-desa. Misalnya, dalam penggunaan Dana Desa, Camat memastikan setiap tahap dilaksanakan sesuai aturan sehingga tidak ada hambatan pencairan.”

Selain itu, Camat berperan sebagai pengawas yang melakukan monitoring langsung ke lapangan. Ia secara rutin menghadiri pertemuan-pertemuan di desa, mengadakan evaluasi bulanan, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat kecamatan maupun desa. Menurut Sekretaris Camat, evaluasi ini sangat penting untuk menjaga efektivitas program “Beliau rutin melakukan monitoring. Misalnya, dalam program bantuan sosial, Camat turun langsung memantau distribusi agar tepat sasaran. Ini membuat program lebih efektif.”

Peran ini juga diakui oleh Kepala Desa mengatakan “*Camat selalu mendampingi kami, terutama terkait penggunaan Dana Desa. Beliau juga sering hadir dalam musyawarah desa dan memberikan arahan.*”

Dari berbagai keterangan informan, terlihat bahwa Camat tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga hadir secara langsung di lapangan untuk memastikan program-program berjalan sesuai target. Pendekatan seperti ini memperkuat hubungan emosional antara pemerintah kecamatan dan masyarakat desa, sehingga membangun kepercayaan dan sinergi dalam pelaksanaan program.

Pendekatan kepemimpinan ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin mampu menginspirasi, memberdayakan bawahan, serta menumbuhkan semangat kerja kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kepemimpinan seperti ini, perangkat kecamatan merasa dihargai dan didorong untuk bekerja lebih optimal, sementara masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam setiap program pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan Camat Mandrehe Utara dalam implementasi program-program pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan inspiratif. Camat berhasil menempatkan dirinya sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai pengarah dan pengawas yang memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.

4.2.2 Kontribusi Terhadap Efektivitas Program

Berdasarkan hasil wawancara, kontribusi kepemimpinan Camat Mandrehe Utara terhadap peningkatan efektivitas program-program pemerintah terlihat nyata pada berbagai aspek, mulai dari pencapaian target program, pengelolaan sumber daya, peningkatan motivasi aparatur, hingga terciptanya koordinasi yang harmonis antar-stakeholder.

Pertama, dalam hal pencapaian efektivitas program, Camat secara aktif mengawal jalannya program prioritas di kecamatan, seperti penurunan angka stunting, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur jalan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Camat Mandrehe Utara menjelaskan *“beberapa program berjalan tepat sasaran. Misalnya, program stunting menunjukkan penurunan angka kasus, bantuan sosial tersalurkan dengan baik, dan infrastruktur jalan desa mulai membaik. Semua ini berkat kerja sama tim yang solid.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Camat berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memastikan program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Camat, yang menyatakan *“Pencapaian target meningkat. Misalnya, realisasi*

program Dana Desa lebih cepat dibanding tahun sebelumnya karena arahan beliau yang jelas.”

Kedua, kontribusi kepemimpinan Camat juga tampak pada kemampuan memotivasi dan mengarahkan bawahan. Berdasarkan keterangan informan, Camat rutin mengadakan pertemuan internal, memberikan arahan teknis, dan memberikan penghargaan non-materiil kepada staf yang berprestasi. Sekretaris Camat menegaskan *“Beliau sering memberikan arahan langsung dan memuji kinerja staf dalam rapat. Hal kecil seperti ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi.”*

Sementara itu, Kasi PMD menambahkan *“Beliau mengadakan pembinaan rutin dan selalu memberikan semangat dalam rapat koordinasi. Beliau juga mengingatkan bahwa tugas kami adalah melayani masyarakat sebaik mungkin.”*

Tindakan ini mencerminkan praktik kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin mampu menginspirasi dan mendorong tim untuk bekerja melampaui standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Ketiga, kontribusi lain yang signifikan adalah pada pengelolaan anggaran dan sumber daya. Kasubag Program menjelaskan *“Saya membantu Camat dalam merencanakan dan mengontrol anggaran. Setiap program harus sesuai RKA dan regulasi yang berlaku. Kami rutin melaporkan realisasi anggaran ke Inspektorat dan Bappeda.”*

Dalam konteks keterbatasan anggaran, Camat menerapkan skala prioritas untuk memastikan program-program yang mendesak tetap berjalan.

Camat mengatakan “*Kami melakukan skala prioritas berdasarkan urgensi agar program penting tetap bisa berjalan meskipun anggaran terbatas.*”

Keempat, kontribusi kepemimpinan Camat juga terlihat dari koordinasi lintas pihak. Camat berhasil membangun sinergi yang baik antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Kepala Desa mengakui “*Program di desa kami lebih cepat selesai karena arahan dan bantuan koordinasi dari Camat. Beliau selalu membantu menjembatani komunikasi dengan kabupaten.*”

Koordinasi yang baik ini mempercepat proses penyelesaian hambatan di lapangan, terutama terkait penyaluran anggaran dan teknis pelaksanaan program. Dengan berbagai kontribusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Camat Mandrehe Utara telah memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah di wilayahnya. Camat tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin visioner yang mampu mengarahkan tim, memotivasi bawahan, mengoptimalkan sumber daya, serta menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan ini mencerminkan karakteristik pemimpin publik yang adaptif dan solutif, sehingga mampu meningkatkan kinerja birokrasi kecamatan dan memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

4.2.3 Tantangan dalam Menerapkan Kepemimpinan yang Efektif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan Camat Mandrehe Utara telah membawa berbagai dampak positif bagi efektivitas program-program pemerintah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan yang efektif di lingkungan pemerintahan kecamatan. Tantangan ini mencakup hambatan struktural, teknis, dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan program.

Pertama, tantangan yang paling menonjol adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas ke desa-desa terpencil di wilayah Mandrehe Utara. Camat Mandrehe Utara menjelaskan *“Kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Ada beberapa desa yang sulit dijangkau sehingga menghambat monitoring.”*

Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat pengawasan langsung dan distribusi bantuan menjadi kurang optimal. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sarana transportasi, terutama pada musim hujan.

Kedua, keterlambatan pencairan anggaran juga menjadi hambatan serius. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Program *“Sering ada keterlambatan penyaluran anggaran dari kabupaten, sehingga jadwal pelaksanaan program mundur. Selain itu, penyesuaian anggaran mendadak membuat kami harus mengubah rencana kerja di tengah jalan.”* Keterlambatan ini memengaruhi jadwal pelaksanaan berbagai program dan memaksa pihak kecamatan untuk melakukan penyesuaian prioritas agar kegiatan yang mendesak tetap bisa dijalankan.

Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa juga menjadi tantangan. Kasi PMD mengungkapkan *“Kapasitas perangkat desa masih beragam. Ada desa yang perangkatnya sudah cukup paham administrasi, tapi ada juga yang perlu banyak bimbingan. Ini memperlambat pelaksanaan beberapa program.”*

Perbedaan kemampuan administrasi dan teknis perangkat desa membuat implementasi program tidak seragam di seluruh wilayah. Keempat, terdapat tantangan komunikasi dan koordinasi antar-perangkat. Menurut Sekretaris Camat *“Kendala yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman teknis staf terhadap prosedur administrasi. Selain itu, komunikasi dengan desa kadang terhambat karena jarak dan keterbatasan jaringan internet.”*

Miskomunikasi sering terjadi ketika ada perubahan kebijakan mendadak dari kabupaten, sehingga perangkat kecamatan harus melakukan koordinasi ekstra untuk memastikan semua pihak memahami arah kebijakan terbaru.

Kelima, rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa program juga menjadi tantangan, terutama untuk kegiatan yang memerlukan gotong royong atau kerja bersama. Kepala Desa menyampaikan *“Masyarakat kadang enggan terlibat karena merasa program bukan prioritas mereka. Kami mengadakan musyawarah desa dan melibatkan tokoh adat agar masyarakat mau ikut serta.”*

Partisipasi masyarakat yang rendah membuat beberapa program berjalan lambat, sehingga pendekatan kultural diperlukan untuk

meningkatkan keterlibatan warga. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Camat menerapkan berbagai strategi. Pertama, meningkatkan rapat koordinasi rutin dengan perangkat kecamatan dan desa serta memanfaatkan media komunikasi daring untuk mempercepat penyampaian informasi. Kedua, menerapkan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran sehingga program penting tetap berjalan meski ada keterbatasan dana. Ketiga, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat desa agar kapasitas mereka meningkat. Keempat, menerapkan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dalam sosialisasi program, sehingga masyarakat merasa memiliki keterlibatan dan kepentingan langsung terhadap program yang dijalankan.

Dengan strategi-strategi tersebut, berbagai hambatan dapat diminimalisir, meskipun belum sepenuhnya teratasi. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan Camat untuk menerapkan kepemimpinan adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi yang dihadapi, mengakomodasi berbagai kepentingan, dan mencari solusi praktis terhadap hambatan di lapangan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif di Kecamatan Mandrehe Utara dapat diatasi melalui kombinasi pendekatan partisipatif, strategi adaptif, dan komunikasi intensif. Camat berhasil menjaga kesinambungan program-program pemerintah meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, dan tantangan sosial di tingkat masyarakat.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Peran Kepemimpinan Camat dalam Implementasi Program

Peran kepemimpinan Camat Mandrehe Utara dalam mengimplementasikan program-program pemerintah dapat dipahami melalui pendekatan kepemimpinan partisipatif-kolaboratif yang ia terapkan. Pendekatan ini terlihat dari caranya melibatkan perangkat kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pada tahap perencanaan, Camat menginisiasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagai forum strategis untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menyelaraskannya dengan prioritas pembangunan daerah. Forum ini tidak hanya menjadi wadah pengumpulan usulan, tetapi juga sarana membangun kesepahaman antar-pihak mengenai tujuan dan sasaran program.

Model kepemimpinan seperti ini selaras dengan pemikiran Siagian (2019), yang menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) di kalangan bawahan dan masyarakat, sehingga mereka terdorong untuk berkontribusi aktif terhadap keberhasilan program. Dengan memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, Camat menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan program pembangunan.

Di sisi lain, Camat juga menjalankan fungsi koordinator dan fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Dalam kapasitas ini, Camat berperan mengadaptasi kebijakan top-down agar sesuai

dengan konteks lokal. Wahyudi (2020) menekankan bahwa pemimpin birokrasi di tingkat kecamatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antarlevel pemerintahan, sehingga dapat memastikan kebijakan pusat dan daerah dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat akar rumput. Peran ini juga memperlihatkan bahwa Camat tidak hanya fokus pada pengendalian administratif, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penyesuaian program sesuai karakteristik lokal.

Lebih jauh, kepemimpinan Camat juga mencerminkan prinsip kepemimpinan transformasional. Karakteristik transformasional tampak dari bagaimana Camat memberikan arahan, motivasi, dan pembinaan kepada perangkat kecamatan, serta terjun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program. Setiawan & Pratama (2021) menegaskan bahwa pemimpin transformasional mampu menginspirasi bawahan melalui keteladanan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan komitmen organisasi terhadap pencapaian tujuan. Dalam konteks Kecamatan Mandrehe Utara, pendekatan ini menciptakan iklim kerja yang lebih produktif, memperkuat koordinasi tim, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Camat juga mengedepankan komunikasi intensif dengan perangkat desa dan masyarakat. Komunikasi dua arah ini membantu mengidentifikasi hambatan sejak dini dan mencari solusi bersama. Menurut Sutrisno (2021), komunikasi efektif adalah salah satu kunci keberhasilan pemimpin publik karena dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan dan mempercepat proses implementasi program. Dengan mengedepankan transparansi dan

keterbukaan, Camat mampu membangun kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan akseptabilitas program pemerintah di tingkat lokal.

Konteks ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Mandrehe Utara bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan inspiratif. Camat tidak hanya melaksanakan perintah dari tingkat atas, tetapi juga berperan sebagai pemimpin lokal yang memahami kebutuhan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi mereka, dan memastikan setiap program benar-benar memberi dampak nyata. Seperti yang ditegaskan Nugroho (2022), pemimpin di level birokrasi daerah perlu memiliki fleksibilitas dan kepekaan sosial agar mampu menjawab tantangan lokal secara tepat dan responsif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Camat Mandrehe Utara dalam mengimplementasikan program pemerintah berlandaskan pada pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan transformasional. Pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas program dengan memperkuat koordinasi lintas pihak, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil pembangunan.

4.3.2 Kontribusi Kepemimpinan Camat terhadap Efektivitas Program

Kontribusi kepemimpinan Camat Mandrehe Utara terhadap efektivitas program pemerintah dapat dilihat dari bagaimana ia menjalankan perannya sebagai pengarah, pengendali, dan penggerak dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Dalam konteks birokrasi kecamatan, efektivitas program tidak hanya diukur dari realisasi anggaran atau capaian fisik, tetapi juga dari seberapa besar program mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Kepemimpinan Camat berperan strategis dalam

memastikan keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Pertama, kontribusi nyata kepemimpinan Camat terlihat pada pengawalan program-program prioritas, seperti penurunan angka stunting, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur jalan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Camat secara aktif melakukan pemantauan di lapangan, menghadiri rapat koordinasi dengan dinas terkait, dan mengadakan evaluasi rutin bersama perangkat kecamatan serta kepala desa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Wahyudi (2020), yang menyatakan bahwa pemimpin birokrasi yang proaktif dalam mengawal kebijakan di tingkat operasional dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena mampu mengidentifikasi kendala sejak dini dan mengambil langkah korektif secara cepat.

Kedua, kontribusi kepemimpinan Camat juga tampak pada kemampuannya memotivasi dan mengarahkan bawahan. Camat tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga membangun iklim kerja yang sehat melalui penghargaan non-materiil, pembinaan rutin, serta memberi teladan dalam kedisiplinan dan integritas. Setiawan & Pratama (2021) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan yang memotivasi bawahan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja aparatur, karena mampu menumbuhkan semangat kolektif dan memperkuat komitmen terhadap tujuan organisasi. Dalam konteks Kecamatan Mandrehe Utara, motivasi ini mendorong perangkat kecamatan untuk bekerja lebih optimal, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya.

Ketiga, kontribusi penting lainnya adalah pengelolaan sumber daya secara adaptif, terutama dalam konteks anggaran. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah kabupaten yang berpotensi menghambat pelaksanaan program disiasati oleh Camat dengan penerapan skala prioritas. Program-program mendesak tetap dijalankan sambil menunggu kelancaran penyaluran anggaran. Strategi ini menggambarkan karakteristik kepemimpinan adaptif, sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho (2022), yaitu kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan strategi dan alokasi sumber daya sesuai dinamika situasi untuk menjaga keberlanjutan program.

Keempat, Camat memperkuat koordinasi lintas pihak. Sinergi yang terbangun antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten mempercepat penyelesaian hambatan teknis dan administratif. Hal ini relevan dengan temuan Rahman (2020), yang menyatakan bahwa keberhasilan program pembangunan lokal sangat ditentukan oleh kejelasan peran pemimpin dalam menjembatani komunikasi antar-stakeholder dan menciptakan mekanisme kerja yang selaras.

Dengan menjalankan fungsi sebagai pengarah, motivator, pengendali anggaran, dan penghubung antar-pihak, Camat Mandrehe Utara berhasil menciptakan pola kerja kolaboratif yang memperkuat efektivitas program. Pendekatan ini juga berdampak pada meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, karena program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, kontribusi kepemimpinan Camat tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga membangun

kepercayaan publik terhadap pemerintah kecamatan. Dengan gaya kepemimpinan yang proaktif, inspiratif, dan adaptif, Camat mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kinerja perangkat, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

4.3.3 Tantangan dalam Menerapkan Kepemimpinan yang Efektif

Meskipun kepemimpinan Camat Mandrehe Utara telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas program pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa tantangan signifikan masih dihadapi dalam penerapan kepemimpinan yang efektif. Tantangan tersebut mencakup hambatan struktural, teknis, maupun kultural, yang berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

Pertama, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi hambatan utama. Beberapa desa di Kecamatan Mandrehe Utara berada di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga menghambat proses monitoring dan pengawasan program. Kondisi geografis ini tidak hanya memperlambat pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga membatasi intensitas komunikasi langsung antara Camat dan masyarakat. Rahman (2020) menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur di wilayah perdesaan menjadi salah satu faktor dominan yang mengurangi efektivitas implementasi program pembangunan karena menurunkan frekuensi pengawasan dan memperpanjang rantai koordinasi.

Kedua, keterlambatan penyaluran anggaran dari pemerintah kabupaten juga menjadi kendala yang berulang. Hal ini mengganggu jadwal pelaksanaan

kegiatan dan memaksa kecamatan untuk menyesuaikan rencana kerja di tengah jalan. Dalam situasi seperti ini, Camat menerapkan skala prioritas, sehingga program-program yang mendesak tetap berjalan. Strategi ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan adaptif, sebagaimana diuraikan oleh Nugroho (2022), yang menekankan pentingnya fleksibilitas pemimpin birokrasi dalam menghadapi ketidakpastian anggaran dan kebijakan yang berubah.

Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya perangkat desa, turut menjadi tantangan. Variasi kompetensi dalam administrasi, manajemen keuangan, dan pemahaman regulasi membuat implementasi program tidak merata di seluruh desa. Kondisi ini selaras dengan temuan Fauzi (2021), yang menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi aparatur di tingkat lokal berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan program pembangunan desa, sehingga pemimpin perlu mengambil peran sebagai pembina dan mentor bagi perangkatnya.

Keempat, hambatan komunikasi dan koordinasi juga ditemukan, terutama akibat keterbatasan jaringan internet di desa-desa terpencil. Hambatan ini memperlambat arus informasi antara kecamatan, perangkat desa, dan pemerintah kabupaten. Sutrisno (2021) menyatakan bahwa komunikasi efektif merupakan faktor krusial dalam kepemimpinan publik, karena miskomunikasi dapat memperpanjang penyelesaian masalah dan mengurangi kecepatan pengambilan keputusan.

Kelima, rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program, khususnya yang memerlukan keterlibatan kolektif seperti kegiatan gotong royong, menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya tingkat partisipasi sering kali dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang program. Untuk mengatasi hal ini, Camat menggunakan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pemuda dalam sosialisasi. Strategi ini sejalan dengan pandangan Hidayat (2021), yang menekankan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Camat Mandrehe Utara mengadopsi strategi adaptif dan kolaboratif. Upaya ini meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi rutin, pemanfaatan media komunikasi daring untuk mempercepat aliran informasi, pelatihan teknis bagi perangkat desa, dan penguatan jaringan sosial dengan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika lapangan, yang sejalan dengan konsep kepemimpinan situasional menurut Hersey & Blanchard (dalam Nugroho, 2022), di mana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan bawahan dan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif di Kecamatan Mandrehe Utara dapat dikelola melalui kombinasi strategi adaptif, komunikasi intensif, penguatan kapasitas SDM, dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang efektif di level kecamatan bukan hanya soal penguasaan

teknis administratif, tetapi juga kemampuan membaca konteks sosial, membangun jaringan kolaborasi, dan menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi hambatan.